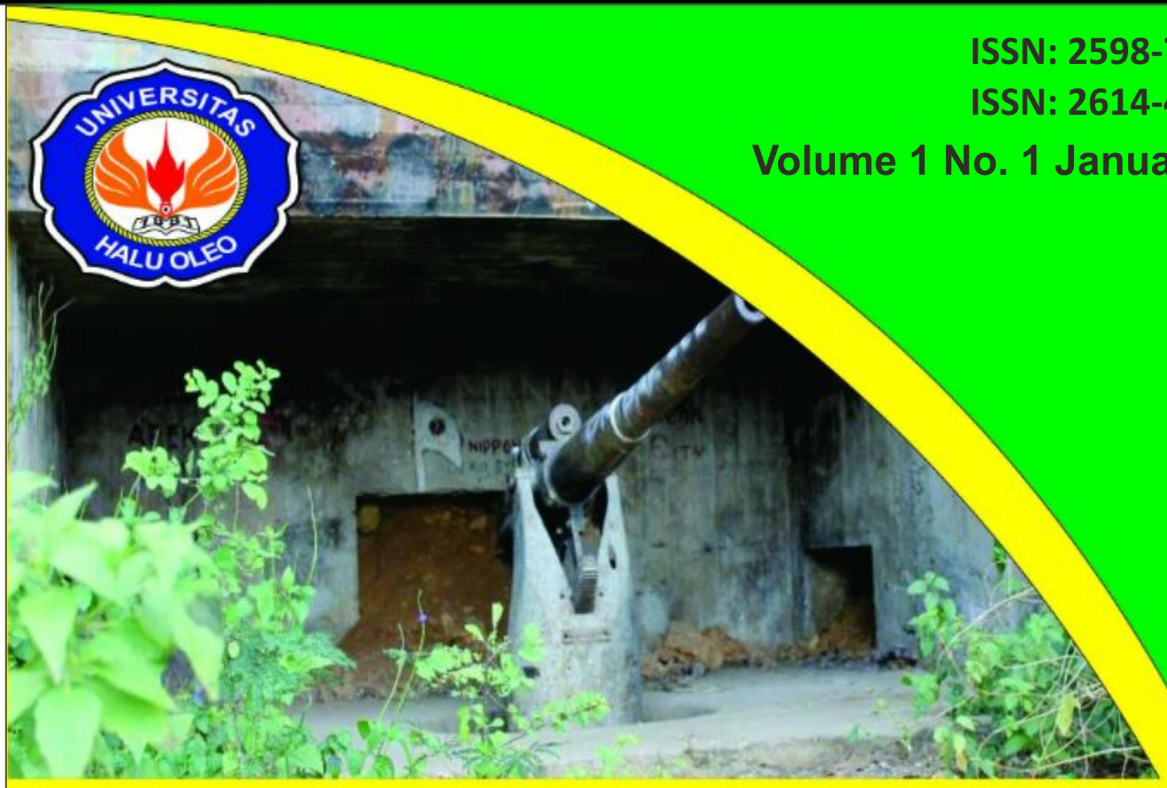
ISSN: 2598-7828 (Cetak)
ISSN: 2614-4395 (Online)
Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2018



JOURNAL IDEA OF HISTORY



Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
Kendari

JOURNAL IDEA OF HISTORY Volume 1 No. 1 Januari - Juni 2018

Journal Idea Of History

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Pimpinan Redaksi
Dr. Aslim, M.Hum.

Pelaksana Redaksi
Dra. Aswati M, M.Hum
Sarman, S.Pd.,M.Pd
Sri Damayanti Djafar, S.Pd.,M.Pd
Suharni Suddin, S.Pd.,M.Pd.
Hasni Hasan, S.Pd., M.Si.
Evang Asmawati, S.Pd, M.Hum.
Nasihin, S.S., M.A.
Khabiirun, S.Sos, M.Sos.

Mitra Bestari
Dr. Rifai Nur, M.Hum
Dr. La Ode Ali Basri, M.Hum
Basrin Melamba, S.Pd.,MA

Penyunting:
Sarman, S.Pd.,M.Pd
Faika Burhan, S.S., M.A.

Desain Grafis:
Masrin, S.IP., MAP.

Alamat Redaksi
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
JL. H.E.A Mokodompit Kendari

DAFTAR ISI

SEJARAH GEREJA KRISTEN PROTESTAN
DI KOTA KENDARI (1928-2016)……. 1-6
Robin Hood Adam
Aswati Mukadas

EKSISTENSI SENI TARI *MODERO* PADA MASYARAKAT MUNA
DI DESA LASUNAPA KECAMATAN DURUKA
KABUPATEN MUNA TAHUN 1946-2016…….. 7-16
Wa Rina
Aslim

PENERAPAN PROGRAM POLITIK ETIS DI DISTRIK KATOBU
ONDERAFDEELING MUNA (1910-1942)……. 17-24
Rosi Aprilani
Hayari

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA TAPI-TAPI KECAMATAN MAROBO
KABUPATEN MUNA (1995-2016)……. . 25-30
Meldy Aswanto
Rifai Nur

PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
KELUARGA DI KECAMATAN KALEDUPA TAHUN 1950-2016……..... 31-40
Murniyati
Faika Burhan

MIGRASI ORANG PATTAE MANDAR KE DESA PEATOA
KECAMATAN LOEA KABUPATEN KOLAKA TIMUR (1980-2016)……... 41-48
Ni'Mah
Ali Hadara

SEJARAH PENGOBATAN TRADISIONAL ORANG BUTON
DI KECAMATAN BATUPOARO KOTA BAUBAU (19862016)……..... 49-62
Wa Ode Lilis Wahid
La Ode Ali Basri

MAKNA SIMBOLIK DALAM PERKAWINAN *ANGKA MATA*
PADA MASYARAKAT MUNA…… 63-72
Sitti Hermina

SEJARAH OBYEK WISATA PANTAI MEMBUKU
DI DESA KADACUA KECAMATAN KULISUSU
KABUPATEN BUTON UTARA (1994-2016)……. 73-81
Harsina
Sarman

PENERAPAN PROGRAM POLITIK ETIS DI DISTRIK KATOBU *ONDERAFDEELING* MUNA 1910-1942

Oleh:
Rosi Aprilani
Hayari

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) sebab-sebab penerapan program politik etis di Distrik Katobu *Onderafdeeling* Muna, dan (2) penerapan program politik etis di Distrik Katobu *Onderafdeeling* Muna. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muna tepatnya di Kecamatan Katobu yang merupakan jenis penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi sumber, (4) interpretasi, dan (5) historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) sebab-sebab diterapkannya politik etis di Distrik Katobu adalah rangkaian perjuangan kaum liberal Belanda untuk memperoleh hak-hak atas perusahaan secara bebas di Indonesia dalam bentuk merencanakan untuk mendirikan pabrik dan kantor kehutanan di Muna. (2) Penerapan program politik etis di Distrik Katobu terbagi atas tiga bidang yaitu (a) edukasi, di mana Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan berusaha mendirikan sekolah rakyat yang sekarang bernama SD Negeri 1 Katobu, SMP Katolik Raha, dan Sekolah Dasar Swasta Katolik Raha (b) irigasi, yaitu memanfaatkan mata air Jompi untuk pemasok kebutuhan air minum dan air bersih bagi penduduk Kota Raha. (c) kolonisasi, yaitu program perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Muna untuk tujuan penanaman dan pengolahan pohon Jati. Selain itu, terdapat juga program pendukung berupa pembangunan sejumlah fasilitas berupa pelabuhan, kantor kehutanan, pabrik kapuk, sarana air bersih, dan pasar sentral sehingga terbentuk sebuah kota yang disebut kota Raha dan sekarang menjadi ibukota Kabupaten Muna.

Kata kunci : politik etis, distrik, *onderafdeeling*

1. PENDAHULUAN

Tindakan pemerintahan kolonial Belanda yang telah mengeksploitasi SDM dan SDA di Indonesia menimbulkan munculnya berbagai kritikan. Conrad Theodore van Deventer seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia mengatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri Indonesia. Hutang itu kemudian dibayar kembali oleh Belanda dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial yang disebut dengan politik etis.

Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai mencari peluang baru untuk melakukan investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah khususnya di Indonesia. Pemerintahan Belanda membutuhkan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan-perusahaan modern yang dibangun oleh pemerintahan Belanda. Pada saat itu, terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan politik etis yang dianggap merupakan dasar kebijakan kolonial baru, yaitu bidang edukasi, irigasi dan kolonisasi. Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan adanya dana. Oleh karena

itu, hutang pemerintah kolonial yang mencapai jumlah sekitar 40 juta *gulden* diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran uang tanpa harus dibebani hutang lagi. Kemudian program politik etis mulai berjalan(Hardjowidjono, 1991: 228).

La Ode Sabora menyebutkan bahwa munculnya politik etis Belanda di Distrik Katobu adalah rangkaian perjuangan kaum liberal untuk memperoleh hak-hak atas perusahaan secara bebas di Indonesia dalam bentuk merencanakan untuk mendirikan pabrik dan kantor kehutanan di Muna. Rencana tersebut mendorong lahirnya politik etis yang kemudian menyerap tenaga-tenaga pribumi. Dengan masuknya kaum liberal di Muna dan melihat hasil-hasil kekayaan alamnya yang menguntungkan seperti kayu jati, kapuk dan kelapa maka dengan mudah dapat merancang untuk mengolah kekayaan alam tersebut. Rencana pendirian pabrik dan kantor kehutanan dengan sendirinya memerlukan buruh dan pegawai rendahan (La Oba, 2005: 78).

Keinginan kaum modal ini sejalan dengan keperluan pemerintah kolonial pada masa itu. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai menerapkan politik etisnya di Distrik Katobu pada masa pemerintahan Raja La Ode Muhammad Maktubu. Pada proses pelaksaan politik etis di bidang edukasi, Belanda mendirikan sekolah rakyat (*vervolog school*) yang saat ini tepatnya Sekolah Dasar Negeri 1 Katobu. Di bidang irigasi, Belanda menggunakan sumber mata air yang berasal dari kali Tula dan kemudian dipindahkan ke sumber mata air Jompi. Dari zaman dahulu hingga zaman ini, sarana air bersih Jompi merupakan sarana air bersih satu-satunya di kota Raha dan sekitarnya (La Oba, 1998 : 96).

Uraian yang dikemukakan di atas merupakan latar belakang yang mendorong penulis untuk mengangkat judul "Penerapan Program Politik Etis di Distrik Katobu 1910-1942". Judul ini merupakan salah satu aspek kajian sejarah lokal Sulawesi Tenggara yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak sebagai bagian sejarah nasional.

Politik etis tidak terlepas dari kepentingan kolonial yang pada hakekatnya justru merupakan intensifikasi dari eksploitasi tanah jajahan. Namun, juga dinyatakan bahwa pemerintah Belanda berkewajiban memperhatikan kepentingan pribumi dan membantu Indonesia ketika berada dalam masa kesulitan. Politik Etis resmi menjadi politik kolonial baru terhadap bangsa Hindia Belanda karena Nederland mempunyai kewajiban moral yang harus dipenuhi terhadap Hindia Belanda (Soehardi, 1984 : 22). Akan tetapi, ketiga program politik etis tersebut tidak berjalan secara merata dan maksimal pada setiap daerah di Indonesia, khususnya di Katobu.

Program politik etis tersebut berusaha menunjukkan bahwa Belanda hendak membalas budi kepada bangsa Indonesia, tetapi pelaksanaannya jauh menyimpang dari perencanaan yang ada. Pada dasarnya, konsep politik etis pada setiap wilayah itu adalah mendirikan sekolah-sekolah, membangun irigasi dan menjalankan program transmigrasi.

Politik etis sesungguhnya merupakan program yang baik karena berdasar pada peri kemanusiaan. Hanya saja pada pelaksanaannya, kepentingan Belanda masih mendominasi dan perwujudannya diselewengkan menjadi politik asosiasi yang hanya menguntungkan pemerintah Belanda. Meskipun Belanda telah melaksanakan tiga bidang program tersebut, pada kenyataannya politik etis belum dapat mengubah nasib bangsa Indonesia. Meskipun dalam bidang pendidikan, bangsa Indonesia telah memperoleh kemajuan. Bangsa Indonesia telah diperbolehkan belajar di sekolah-sekolah model Barat, hingga ke perguruan tinggi, tetapi ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan tertentu.

Pada pokoknya politik etis terbagi dalam dua bagian; Pertama, segi ekonomi dan kedua, segi sosial-budaya. Pada segi ekonomi, politik ini tidak berbeda dengan politik liberal sebelumnya. Ini berarti modal swasta tetap diberi kesempatan-kesempatan yang luas untuk bergerak di daerah koloni dan pemerintah akan menjamin ketentraman dengan pasukan-pasukan birokrasinya.

Segi sosial-budayanya, sering juga dinamakan *assosiatie politiek*. Maksudnya, peningkatan sosial budaya penduduk sejajar dengan peningkatan sosial-budaya pihak orang-orang Eropa. Segi sosial-budaya mengharuskan pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan sedapat-dapatnya meningkatkan nilai-nilai budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya Barat. Dengan demikian, dikeluarkanlah berbagai aturan dan kebijaksanaan dalam bidang sosial budaya. Tindakan ini sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20. Malahan ada pejabat yang mengatakan, bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dalam sepuluh tahun pertama pada abad ke-20 lebih banyak dibandingkan pada masa 300 tahun sebelumnya (Leirissa, 1985: 22). Adapun tiga konsep politik etis, yaitu:

Pertama, konsep pendidikan. Pada dasarnya, setiap manusia senantiasa ingin mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik itu sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, sehingga dalam mengorganisasikan peradaban manusia selalu seiring dengan laju perkembangan pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan, sangat berpengaruh dalam menentukan pola kehidupan dan perkembangan hidup manusia. Proses belajar dan pendidikan yang dijalani masyarakat pada zaman yang berbeda tersebut telah menjadikan manusia mampu memenuhi kebutuhan, menjalani kehidupan hingga memasuki zaman peradaban seperti sekarang ini (Abdullah dan Safarina, 2014: 59).

Kedua, konsep irigasi. Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi lahan pertanian dengan cara membendung sumber air. Irigasi juga berarti usaha penyediaan air dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Pada zaman dahulu,irigasi dilakukan jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, sehingga irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu. Di Indonesia, irigasi dengan modeltersebut dikenal dengan istilah penyiraman. Ketiga, konsep kolonisasi (perpindahan penduduk) dengan program perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Muna untuk tujuan penanaman dan pengolahan pohon Jati. http://seputarpengertian.blogspot.com/29/10/2016

Praktek politik etis tersebut dapat dianalisis menggunakan teori nasionalisme. Secara etimologi, kata nasionalisme, *natie* dan nasional berasal dari bahasa Latin, yaitu *nation* yang berarti ‘bangsa yang dipersatukan karena kelahiran’. Arti dan hakikat yang melekat pada kata itu sudah berubah menurut zaman dan tempat, serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Makna istilah *natie* dan nasionalisme dalam ilmu politik yaitu, *natie* dibaca *natsi*, nasion. Defenisi *natie* adalah masyarakat manusia yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah. Nasionalisme merupakan kesadaran diri yang meningkat dan diwujudkan oleh kegiatan yang melimpah pada negara dan bangsa sendiri dan kadang-kadang disertai akibat-akibat mengecilkan arti dan sifat bangsa lain (Suhartoyo, 1985: 42).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Kuntowijoyo (2013: 69) menyebutkan bahwa tata kerja metode ini adalah sebagai berikut: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi sumber, (4) interpretasi sumber, (5) penulisan sejarah.

2. PEMBAHASAN

2.1 Sebab-Sebab Penerapan Program Politik Etis di Distrik Katobu

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah di kawasan Nusantara yang menjadi salah satu sasaran pendudukan Belanda. Kedatangan Belanda di daerah Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Muna merupakan realisasi dari sifat ketamakan dari bangsa Belanda itu sendiri. Negeri Belanda dilanda kesulitan dan kemelut ekonomi setelah terlibat perang 80 tahun dengan Spanyol. Selain itu, Belanda juga mengalami keterbatasan untukmelakukan perdagangan dengan dunia timur karena mendapat tekanan di daerah Lisabon dengan Inggris (La Oba, 2005: 71).

Munculnya politik etis di Indonesia merupakan akibat dari upaya kaum liberal di negeri Belanda pada sekitar pertengahan abad ke-19 yang telah berjuang untuk memperoleh hak-hak perusahaan secara bebas di tanah jajahan termasuk di Indonesia. Demikian halnya munculnya politik etis di Distrik Katobu adalah rangkaian perjuangan kaum liberal Belanda untuk memperoleh hak-hak atas perusahaan secara bebas di Indonesia dalam bentuk merencanakan untuk mendirikan pabrik dan kantor kehutanan di Muna. Rencana tersebut telah mendorong lahirnya politik etis yang justru memerlukan tenaga-tenaga pribumi (La Ode Muhajiri, wawancara 23 Februari 2017).

Dari pernyataan La Ode Muhajiri di atas, maka program politik etis ini pada hakekatnya menghendaki adanya perubahan kaum kolonial di daerah jajahan dan menekankan kesejahteraan penduduk bumi putra khususnya di daerah Muna. Untuk itu, Conrad Theodore van Deventer sebagai pendukung ide politik kolonial baru dan sebagai pemimpin liberal menganjurkan agar pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan materil dan moril penduduk pribumi, mengadakan desentralisasi pemerintahan serta menggunakan tenaga pribumi dalam pemerintahan atau kepegawaian di Indonesia.

Sesuai dengan anjuran Conrad Theodore van Deventer di atas, maka pemerintah Hindia Belanda di Muna menganjurkan adanya gerakan politik etis yang meliputi:

1. Pembangunan di bidang pendidikan di daerah Muna
2. Pembangunan di bidang pengairan di daerah Muna
3. Pembangunan di bidang kesehatan di daerah Muna
4. Mengadakan transmigrasi dari pulau Jawa ke daerah Muna
5. Perubahan sistem pemerintahan di Kerajaan Muna

2.2 Penerapan Program Politik Etis di Distrik Katobu

Untuk menerapkan program politik etis di Distrik Katobu, terdapat tiga bidang yang diusulkan oleh Conrad Theodore van Deventer yang merupakan seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh politik etis, yaitu :

1. Bidang Edukasi

Sebagaimana yang terdapat dalam cerita masyarakat Muna dalam lintas sejarah bahwa sebelum kehadiran Belanda di Distrik Katobu, banyak orang Muna yang masih buta aksara. Masyarakat Muna belum mengenal pendidikan secara formal kecuali pendidikan non formal dan informal yang bernafaskan adat istiadat dan ajaran agama Islam, misalnya pengajian, nasehat/petuah dari orang-orang tua adat dan belajar menulis huruf Al quran sebagaimana dalam ajaran agama Islam (La Oba, 2005: 95).

Setelah Belanda masuk di Distrik Katobu pada 1906, masyarakat Muna dikenalkan dengan pendidikan formal. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan berusaha mendirikan sekolah untuk tempat belajar, membaca, menulis dan berhitung serta belajar bahasa Belanda (Asnawati, wawancara 28 Februari 2017). Perbaikan terhadap bidang pendidikan mulai dilakukan sejak dilancarkan program politik etis. Pada 1910 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah rakyat di kota Raha yang tepatnya Sekolah Dasar Negeri 1 Katobu.

Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang didirikan oleh bangsa Belanda untuk menerapkan salah satu dari program politik etis. Melalui beberapa sumber tertulis yang ditemukan, disebutkan bahwa SD Negeri 1 Raha mulai dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bukti tentang berdirinya sekolah tersebut berdasarkan observasi di sekolah SD Negeri 1 Katobu yang hingga saat ini masih ada. Sekolah tersebut sudah mengalami perubahan nama menjadi SD Negeri 1 Katobu dan sekolah ini terletak di Kecamatan Katobu (observasi, 28 Februari 2017).

Lama pendidikan di sekolah rakyat tersebut hanya sampai pada jenjang kelas dua. Tamatan sekolah rakyat ini dapat diperkerjakan sebagai pegawai rendahan atau buruh pelabuhan. Sebagaimana tujuan mereka adalah hanya untuk dapat membaca, menulis, dan sedikit mengetahui perhitungan untuk dapat menghitung meter yang dipekerjakan pada buruh kehutanan serta dalam mengekspor hasil hutan utamanya jati. Pada tahun 1930 sekolah rakyat berkembang menjadi sekolah yang diberi nama Gubernamen dan lama pendidikannya ditambah sampai pada kelas lima. Tamatan sekolah tersebut dapat dipekerjakan sebagai pengawas pada kantor-kantor tertentu di bidang pemerintahan khususnya ditugaskan sebagai pengawas dalam kegiatan pengolahan dan pengiriman kayu jati.

2. Bidang Irigasi

Di Indonesia, sejak 1890 sampai 1893 dibangun bangunan air untuk daerah persawahan yang sangat luas dengan mengerahkan tenaga 300.000 orang berstartus pekerja paksa untuk melakukan pekerjaan harian. Biaya yang dipakai sebesar satu juta. Pada masa tanam paksa tersebut telah dibuat bangunan irigasi di Panarukan, Cirebon, Delta Brantas dan Demak. Pada 1885 didirikan dinas irigasi untuk menyiapkan irigasi daerah persawahan daerah Gubernamen. Kemudian didirikan daerah irigasi, seperti serayu pada 1889. Daerah irigasi Demak meliputi 61.900 bau. Pekalongan 156.000 bau. Pengaruh irigasi pada hasil pertanian pada umumnya sangat baik (Leirissa, 1985 : 31).

Di Sulawesi Tenggara juga diterapkan program politik etis dalam bidang irigasi khususnya di Distrik Katobu. Pada 1922, Pemerintah Hindia Belanda membangun sarana air bersih secara sederhana, yang terletak di hutan Warangga Distrik Katobu. Pada 1930, sarana air bersih tersebut direhabilitasi dengan menggunakan mesin yang lebih modern dari sebelumnya. Sumber mata air

yang digunakan adalah kali Tula lalu dipindahkan ke sumber mata air Jompi. Mata air ini merupakan pemasok kebutuhan air minum dan air bersih bagi penduduk Kota Raha. Masyarakat kota Raha sering memanfaatkan mata air ini untuk mencuci maupun berenang atau hanya sekedar menikmati keindahan mata air ini. Hingga saat ini sarana air bersih Jompi tersebut merupakan sarana air bersih satu-satunya di Kota Raha dan sekitarnya yang masih dimanfaatkan.

3. Kolonisasi

Pembicaraan mengenai kolonisasi telah menunjukkan bahwa distribusi penduduk antara daerah satu dengan daerah yang lain tidaklah seimbang. Ada daerah yang sangat jarang penduduknya dan ada pula yang sangat padat. Daerah yang padat penduduk sejak dulu telah menerima tekanan untuk melakukanberpindah tempat dan memperluas daerah jangkauan. Daerah penerima pendatang biasanya adalah daerah yang masih memiliki kemungkinan dan potensi untuk dikembangkan (Leirissa, 1981: 63).

Di Sulawesi Tenggara juga diterapkan program politik etis di bidang kolonisasi khususnya di Desa Bangunsari, Muna. Untuk pertama kalinya masuknya orang Jawa di Desa Bangunsari dimulai pada 1937 dalam program kolonisasi orang-orang Jawa yang dipindahkan ke daerah Muna. Orang Jawa itu dikolonisasikan bukan untuk kesejahteraan hidupnya tetapi didatangkan ke pulau Muna untuk dijadikan buruh dan kuli dalam pengolahan kayu jati untuk kepentingan Hindia Belanda sendiri (Achmad Bakri, wawancara 27 Februari 2017).

Orang-orang Jawa yang dibawa ke Desa Bangunsari berasal dari dua daerah yaitu Kediri di Jawa Timur dan Blora, di Jawa Tengah dengan berjumlah ± 200 KK. Orang Jawa itu dibawa ke Pondok Pitu atau Pondok Tujuh dengan maksud sebagai percontohan penanaman jati. Saat itu, masyarakat pribumi Muna menyebut pohon jati dengan nama kulidawa karena kulinya berasal dari Jawa (Achmad Bakri, wawancara 27 Februari 2017).

Keterangan informan di atas menunjukkan bahwa kedatangan orang Jawa di Desa Bangunsari mulai sejak masa kolonisasi Belanda pada 1937. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda bertujuan ingin mengembangkan tanaman jati di pulau Muna.

Berdasarkan hasil observasi (02 Maret 2017) terhadap masyarakat Jawa di Desa Bangunsari hingga kini masyarakatnya masih ada dengan bermata pencaharian sebagai penanam jati dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah kerajinan seperti tempat tidur, kursi dan lemari. Selain itu, ada juga yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, tukang batu, penjahit, pedagang, PNS, dan pensiunan.Penerapan politik etis Belanda tidak hanya pada bidang edukasi, irigasi dan kolonisasi, tetapi pada bidang ekonomi dan politik juga sebagai program pendukung pihak Belanda dalam menerapkan politik etisnya.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebab-sebab penerapan program politik etis di Indonesia khususnya di Distrik Katobu Muna adalah di samping pemerintah Hindia Belanda membalas budi terhadap rakyat pribumi juga adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak sebagai permintaan kebutuhan di negara induk. Demikian halnya munculnya politik etis di Distrik Katobu adalah rangkaian perjuangan kaum liberal Belanda untuk memperoleh hak-hak atas perusahaan secara bebas di Indonesia dalam bentuk merencanakan untuk mendirikan pabrik dan kantor kehutanan di Muna. Rencana tersebut telah mendorong lahirnya politik etis yang kemudian memanfaatkan tenaga-tenaga pribumi
2. Penerapan program politik etis di Distrik Katobu terbagi atas tiga bidang yaitu : (a) edukasi. Program edukasi telah membangkitkan berbagai ilmu pengetahuan yaitu dari zaman prasejarah hingga zaman sejarah. Realisasi penerapan program politik etis di Katobu dapat terlihat melalui fasilitas pendidikannya yang saat ini telah dikembangkan. Program pendidikan yang telah diterapkan oleh Belanda yaitu Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan berusaha mendirikan sekolah SD Negeri 1 Katobu, SMP Katolik Raha, dan SDS Katolik Raha sebagai tempat belajar, membaca, menulis dan berhitung serta belajar bahasa Belanda. (b) irigasi. Mata air Jompi merupakan pemasok kebutuhan air minum dan air bersih bagi penduduk Kota Raha. Masyarakat kota Raha sering memanfaatkan mata air ini untuk mencuci maupun berenang atau hanya sekedar menikmati keindahan mata air ini. Hingga saat ini sarana air bersih Jompi tersebut merupakan sarana air bersih satu-satunya di Kota Raha dan sekitarnya. (c) kolonisasi, yaitu program perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Muna untuk tujuan penanaman dan pengolahan pohon Jati. Selain itu, terdapat juga program pendukung berupa pembangunan sejumlah fasilitas berupa pelabuhan, kantor kehutanan, pabrik kapuk, sarana air bersih, dan pasar sentral sehingga terbentuk sebuah kota yang disebut kota Raha dan sekarang menjadi ibukota Kabupaten Muna.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah dan Safarina. 2014. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hardjowidjono, Dharmono. 1991. *Sejarah Indonesia Modern.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kansil, C. S. T dan Julianto. 1988. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Kuntowijoyo, 2013.*Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

La Anti, 2003. *Muna Affair Tahun 1947(Perlawanan Batalyon Sadar Terhadap NICA di Distrik Katobu Onderafdeeling Muna)*, Skripsi Kendari: FKIP Unhalu.

La Oba, 2005. *Muna Dalam Lintasan Sejarah*, Raha : Sinyo M.P.

Leirissa, Z. R, 1985. *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta : Akademika Pressindo.

Rusli, Said, 1983. *Pengantar Ilmu Kependudukan.* Jakarta: LP3ES.

Soehardi, Abdullah, 1984. *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan.* Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.

Suhartoyo, Hardjosatoto 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Dokumen/Arsip

Muna Dalam Lintas Sejarah

RPJM Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa


9 772614 439002